

PROBLEMATIKA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ISLAM (Pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah)

Amir Maliki Abitolkha
UIN Sunan Ampel Surabaya
Email: amir_abitilkha@gmail.com

Abstrak: Masyarakat muslim memiliki ekspektasi yang sangat besar terhadap keberhasilan dan kemajuan pendidikan Islam. Namun ekspektasi itu belum terealisasi hingga sekarang. Hingga kini masyarakat menangkap citra lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan “kelas dua”. Untuk itu, masyarakat muslim harus merespon dengan melakukan pembenahan dan perbaikan strategi manajerialnya. Dengan pendekatan MBS, lembaga pendidikan Islam dapat melakukan proses pengambilan keputusan yang berada pada sistem pengelolaan, kepemimpinan, peningkatan mutu dan *effective schools*. Melalui pendekatan ini, ada tiga kunci kemajuan pendidikan Islam, yaitu epistemologi pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, dan kesadaran pendidikan.

Kata kunci: Pendidikan Islam, Manajemen Berbasis Sekolah.

Abstract: Muslim Community has a great expectation to the success and advancement of Islamic education. But those expectations have not been realized. People still considere that Islamic education institutions as "second class" institution. Therefore, the Muslim community must respond it by reforming and improving the managerial strategies. Through MBS approach, Islamic education institutions are able to make the decision-making process on the system management, leadership, quality improvement and effective schools. This approach has three key advancement for Islamic education including the epistemology of Islamic education, Islamic education management, education awareness.

Keywords: Islamic education, School-Based Management

Pendahuluan

Sudah sejak lama lembaga pendidikan Islam selalu dihadapkan pada berbagai masalah kompleks yang membelit percepatan perkembangan dan kemajuannya. Masalah tersebut meliputi kelembagaan, kepemimpinan, keuangan, kepegawaian, kurikulum, kesiswaan, dukungan masyarakat, tingkat kepercayaan, konflik, feodalisme, dan sebagainya. Masing-masing komponen ini menyimpan potensi yang menghambat dan dalam batas-batas tertentu dapat mengancam eksistensi, keberlangsungan, kemampuan bersaing, dan kemajuan lembaga pendidikan Islam.

Dari sekian lembaga pendidikan Islam, baru terdapat beberapa lembaga yang berupaya keras *me-manage* berbagai komponen pendidikannya sehingga relatif mampu keluar dari jeratan belunggu masalah di atas dan berkembang menjadi lembaga pendidikan Islam yang maju, bahkan paling maju seperti di MIN I Malang, MI dan MTs Pembangunan Jakarta Selatan, MAN Insan Cendekia Serpong, dan sebagainya. Lembaga pendidikan ini menjadi alternatif bagi masyarakat.

Kini, beberapa madrasah lain sedang bekerja keras, berlari, dan mengejar demi mengikuti jejak empat madrasah tersebut. Beberapa lembaga pendidikan Islam ini tengah berproses *me-manage* komponen pendidikan Islam. Sayangnya jumlah lembaga pendidikan yang sedang berbenah tidak berbanding lurus dengan banyaknya lembaga pendidikan Islam yang belum bergerak untuk melakukan pembenahan manajemen secara serius. Kendala inilah yang kerap mewarnai citra lembaga pendidikan Islam yang masih terpuruk.

Hingga kini masyarakat luas menangkap citra lembaga pendidikan Islam sebagai lembaga pendidikan “kelas dua”. Sungguh istilah pendidikan “kelas dua” tidak hanya mencerminkan penilaian objektif-empirik, tetapi juga merupakan pelecehan. Kenyataan tersebut jelas akan melahirkan stigma negatif terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam. Jika stigma negatif ini masih melekat dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat luas, maka sudah tentu juga akan berdampak negatif terhadap masa depan pendidikan Islam.

Stigma negatif terhadap lembaga pendidikan Islam rasanya tidak perlu direspon secara reaktif karena mungkin saja stigma tersebut memang mencerminkan kebenaran substansi pendidikan Islam.

Respon yang terbaik adalah melakukan pembenahan, penggodokan, dan pembenahan strategi manajerial maupun *leadership*-nya. Perubahan yang dimaksud adalah merevisi strategi-strategi konvensional menjadi strategi-strategi transformatif, di mana strategi ini akan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam menjadi kekuatan yang andal dalam mengawal, mengantarkan, dan mewujudkan keberhasilan dan kemajuan lembaga pendidikan Islam, baik secara fisik maupun kualitasnya.

Wujud kemajuan fisik adalah adanya peningkatan pembangunan gedung, akses ke sekolah/madrasah/kampus, tembok keliling, gapura, lapangan olahraga, peralatan pembelajaran, dan sebagainya. Sedangkan kemajuan kualitas/mutu dapat diwujudkan melalui upaya meningkatkan pencapaian prestasi akademik maupun nonakademik, profesionalisme pegawai, penguatan SDM, baiknya perilaku pegawai dan peserta didik, bagusnya pola kerja pegawai dan pola belajar peserta didik, dan sebagainya. Dalam kenyataannya, upaya mewujudkan kemajuan kualitas pendidikan Islam jauh lebih berat daripada kemajuan fisiknya. Padahal kemajuan keduanya harus diwujudkan meskipun bertahap ketika tidak mampu merealisasikan dalam waktu yang bersamaan.

Sudah seharusnya seorang manajer lembaga pendidikan Islam mampu menempuh berbagai strategi dalam memajukan lembaga ini, yakni mulai dari penyiapan strategi pemberdayaan pendidikan Islam, strategi menentukan konsentrasi manajemen pendidikan Islam sebagai prioritas ketika tidak memungkinkan *me-manage* seluruh komponennya, strategi mengatasi problem kepemimpinan, strategi mengatasi problem ideologis dan hubungan keluarga, strategi mengatasi pembiayaan pendidikan Islam, sampai pada strategi mengembangkan lembaga pendidikan Islam. Untuk itu seorang manajer harus berfokus pada persiapan strategi dalam memajukan lembaga pendidikan Islam.

Pengasuh pesantren, kepala madrasah, kepala sekolah Islam, rektor, dekan, ketua, dan direktur harus mempersiapkan solusi-solusi untuk berbagai masalah secara multidimensional, dan bukan hanya terdiam menduduki jabatan dan menikmati tunjangan. Sejauh itu efektif dan efisien, maka seorang manajer bebas memilih dan menentukan strateginya dalam memajukan lembaga pendidikan

Islam. Oleh karena itu, melalui tulisan yang sangat singkat ini penulis mencoba mengkaji kembali problematika penyelenggaraan pendidikan Islam.

Pendidikan Islam dalam Perspektif

Kelembagaan pendidikan sebagai tempat belajar atau menuntut ilmu mempunyai peranan penting dalam upaya proses belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Karenanya Nabi SAW memberikan petunjuk kepada sekelompok orang yang berkumpul di rumah, di masjid atau di lingkungan masyarakat supaya mengajarkan al-Qur'an. Petunjuk Nabi SAW ini telah menginspirasi para penyelenggara pendidikan untuk menyiapkan atau memanfaatkan tempat di mana saja terdapat orang yang dapat menjangkaunya untuk belajar agama dan ilmu pengetahuan lainnya.

Charles Michael Stanton, menggolongkan lembaga pendidikan Islam ke dalam dua bentuk, yaitu "lembaga pendidikan formal yang mengajarkan pengetahuan agama, dan pendidikan nonformal yang mengajarkan pendidikan umum termasuk filsafat".¹ George Makdisi, dalam hal yang sama menyebutnya "sebagai lembaga pendidikan eksklusif (tertutup) yang hanya mengajarkan pengetahuan agama, dan lembaga pendidikan inklusif (terbuka) yang mengajarkan pengetahuan umum".²

Pendidikan adalah solusi yang sangat strategis dalam upaya membangun moralitas bangsa, karenanya pendidikan seyogianya dipahami sebagai suatu proses bukan sebagai suatu seni ataupun teknik, pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Mortimer J. Adler, yang mengartikan pendidikan sebagai proses semua kemampuan manusia dan dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain

¹Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, terj. Afandi dan Hasan Asari (Jakarta: Logos, 1994), hlm. 25.

²George Makdisi, *Typology of Institutions of Learning, (An Antology Studies)*, Issa J. Boulatta (Montreal: McGill Indonesia IAIN Development Project, 1992), hlm. 16.

atau dirinya sendiri dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan yaitu kebiasaan yang baik.³

Berbeda dengan Herman H. Horne, ia mengatakan “Pendidikan harus dipandang sebagai suatu proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik dengan alam sekitar, dengan sesama manusia dan dengan tabiat tertinggi dari kosmos.⁴ Pendidikan merupakan perkembangan yang terorganisasi dari semua potensi-potensi manusia, moral, intelektual dan jasmani oleh dan untuk kepribadian individualnya dan kegunaan masyarakatnya yang diharapkan agar semua aktivitasnya sesuai dengan tujuan akhir hidupnya.⁵

Menurut Konfisius dan Socrates pendidikan dipahami sebagai pencarian ilmu pengetahuan dan berbuat kebaikan yang dilakukan seumur hidup. Dalam penerapannya, pendidik harus menanamkan tujuan pendidikan kepada siswa untuk senang belajar dan keinginan untuk meraih hidup yang lebih baik. Untuk mencapai tujuan ini maka kurikulum harus menjadi salah satu landasan untuk pengembangan nilai-nilai kebaikan dan spiritual bagi siswa.⁶

Sedangkan agama Islam yang membawa nilai-nilai dan norma-norma kewahyuan bagi kepentingan hidup manusia di atas bumi, bersifat aktual dan fungsional bila diinternalisasikan ke dalam pribadi melalui proses kependidikan yang konsisten terarah.

Oleh karena itu, proses kependidikan Islam memerlukan konsep-konsep yang dapat dikembangkan menjadi teori-teori yang teruji dalam aplikasinya di lapangan. Bangunan teoritis kependidikan Islam akan dapat berdiri tegak di atas pondasi pandangan dasar (filosofi) yang telah digariskan oleh Allah dalam al-Qur’an. Apa yang terjadi sekarang adalah akibat logis dari perubahan sosial di berbagai sektor kehidupan umat manusia beserta nilai-nilainya yang juga ikut mengalami pergeseran telah memaksa pendidikan Islam harus merubah strategi dan metode operasionalnya. Perubahan strategi dan

³Mortimer J. Adler, *Philosophies of Education* (Chicago : University Chicago Press, 1962), hlm. 209.

⁴Herman H. Horne, *An Idealistic Philosophies Of Education* (Chichago : University Chicago Pres, 1962), hlm. 140.

⁵Ihsan Hamdani, *Filsafat Pendidikan Islam* (Bandung, Pustaka Setia, 2007), hlm. 28.

⁶Charlene Tan, *Philosophical Reflections For Education*, Chapter 1, Philosopgers on Education (London: Institut of Education University of London), hlm. 3.

metode menuntut adanya perombakan model sampai dengan institusinya, sehingga lebih efektif dan efisien dalam arti pedagogis, sosiologis dan kultural.⁷

Pendidikan Islam adalah studi tentang sistem dan proses kependidikan yang berdasarkan Islam untuk mencapai produk atau tujuannya baik secara teoritis maupun praktis.⁸ Dalam pandangan Zaini seperti dikutip Ahmad Syafi'i Ma'arif, ia berpendapat bahwa Pendidikan Islam diartikan sebagai usaha pengembangan fitrah manusia dengan ajaran Islam, agar terwujud kehidupan manusia yang makmur dan bahagia.⁹

Dalam perspektif lain, pendidikan Islam adalah merupakan proses pembimbingan, pembelajaran dan atau pelatihan terhadap manusia agar nantinya menjadi orang Islam yang mampu melaksanakan peran sebagai seorang muslim.¹⁰ Dalam pengertian yang sama pendidikan Islam dipahami sebagai bimbingan jasmani-rohani berdasarkan hukum-hukum Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam.¹¹

Sedangkan pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Toumy al-Syaebani seperti dikutip oleh Arifin, diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan masyarakatnya dan kehidupan alam sekitarnya melalui proses kependidikan yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam.¹²

Uraian di atas mendeskripsikan bahwa pendidikan Islam berarti suatu proses yang komprehensif tentang pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan fisik, sehingga seorang muslim disiapkan dengan baik untuk dapat melaksanakan tujuan-tujuan kehadirannya oleh Tuhan sebagai hamba dan wakil-Nya di dunia.¹³

⁷M. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 2-3.

⁸M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm.11.

⁹Ahmad Syafii Ma'arif, *Pendidikan Berparadigma Profetik* (Yogyakarta: UGM Press, 2004), hlm. 50.

¹⁰Tadjab, *Dasar-dasar Kependidikan Islam* (Surabaya: Karya Aditama, 1996), hlm. 12.

¹¹Imam Bawani, *Segi-segi Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1986), hlm. 28.

¹²M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hlm. 14.

¹³M. Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Lantabora Press, 2003), hlm. 128.

Konsep Dasar Manajemen Berbasis Sekolah

Kehadiran konsep manajemen berbasis sekolah dalam wacana pengelolaan pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari konteks gerakan “restrukturisasi dan reformasi” sistem pendidikan nasional melalui desentralisasi dan pemberian otonomi yang lebih besar kepada satuan pendidikan atau sekolah. Hal ini diinspirasi oleh beberapa konsep pengelolaan sekolah, seperti *Self managing school* atau *school based management*, *self governing school*, *local management of schools* dan *school based budgeting* atau *quaranty maintained schools*.¹⁴

Konsep-konsep tersebut menjelaskan bahwa sekolah ditargetkan untuk melakukan proses pengambilan keputusan (*school based decision making*) yang berada pada sistem pengelolaan, kepemimpinan serta peningkatan mutu (*administrating for excellence*) dan *effective schools*.

Manajemen berbasis sekolah pada intinya adalah memberikan kewenangan terhadap sekolah untuk melakukan pengelolaan dan perbaikan kualitas secara terus menerus. Dapat juga dikatakan bahwa manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan (*stakeholder*) yang berkaitan dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah.

Secara bahasa, manajemen berbasis sekolah (MBS) berasal dari tiga kata yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sedangkan sekolah berarti lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat untuk menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka manajemen berbasis sekolah (MBS) dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berdasarkan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.

Priscilla Wohlstetter dan Albert Mohrman menjelaskan bahwa pada hakikatnya, manajemen berbasis sekolah berpijak pada *Self Determination Theory*. Teori ini menyatakan bahwa apabila seseorang atau sekelompok orang memiliki kepuasan untuk mengambil

¹⁴Umiarso dan Imam Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan* (Yogyakarta: Ircisod, 2010), hlm. 69.

keputusan sendiri, maka orang atau kelompok orang tersebut akan memiliki tanggung jawab yang besar untuk melakukan apa yang telah diputuskan¹⁵. Berangkat dari teori ini, banyak manajemen berbasis sekolah yang dikemukakan oleh para pakar.

Mulyono mendefinisikan manajemen berbasis sekolah sebagai penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau mencapai tujuan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Sementara itu, Slamet mengartikan manajemen berbasis sekolah sebagai pengkoordinasian dalam penyerasian sumber daya yang dilakukan secara otomatis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif). Hal ini berarti sekolah harus bersifat terbuka dan inklusif terhadap sumber daya di luar lingkungan sekolah yang mempunyai kepentingan selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

Priscilla Wohlster dan Albert Mohrman menjelaskan secara luas bahwa manajemen berbasis sekolah adalah pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada partisipasi sekolah pada tingkat lokal guna memajukan sekolahnya. Partisipasi lokal yang dimaksudkan adalah partisipasi kepala sekolah, guru dan masyarakat lokal.

Selaras dengan Wohlster dan Mohrman, Mulyasa menjelaskan bahwa MBS merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, dan pemerintah.¹⁶

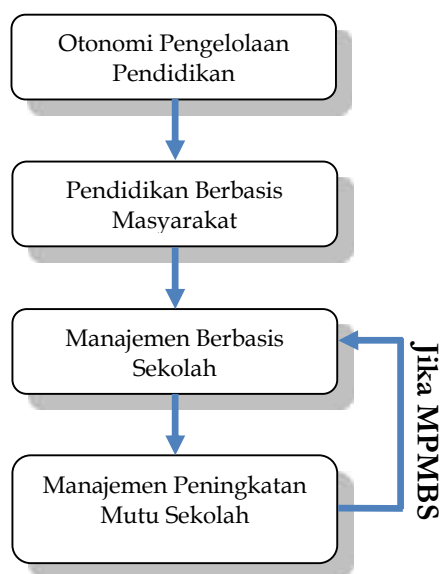
Sesuai dengan deskripsi di atas, manajemen berbasis sekolah (MBS) merupakan pemberian otonomi penuh kepada sekolah untuk

¹⁵Ibid., hlm. 72.

¹⁶E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 11.

secara aktif-kreatif serta mandiri dalam mengembangkan dan melakukan inovasi dalam berbagai program untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri yang tidak terlepas dari kerangka tujuan pendidikan nasional dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), serta sekolah harus mampu mempertanggungjawabkan kepada masyarakat. Artinya manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan seluruh kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah.

Secara umum, skema berpikir kebijakan manajemen berbasis sekolah (MBS) di Indonesia adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Berpikir Kebijakan MBS di Indonesia¹⁷

Menurut Levacic dalam Bafadal terdapat tiga karakteristik manajemen berbasis sekolah (MBS) yang harus dikedepankan, diantaranya adalah: pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam

¹⁷ Ibid., hlm. 75.

pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan pada *stakeholder* sekolah. Kedua, domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup kurikulum, kepegawai, keuangan, sarana-prasarana dan penerimaan siswa baru. Ketiga, walaupun keseluruhan domain peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, namun diregulasikan yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.¹⁸

Edmon mencoba mengemukakan berbagai indikator yang menunjukkan karakteristik dari konsep manajemen berbasis sekolah (MBS) antara lain adalah:

- a. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;
- b. Sekolah memiliki visi dan target mutu yang ingin dicapai;
- c. Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat;
- d. Adanya harapan yang tinggi dari personal sekolah (kepala sekolah, guru dan staf termasuk siswa) untuk berprestasi;
- e. Adanya pengembangan staf sekolah yang terus-menerus sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademis dan administratif, serta pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/ perbaikan mutu;
- g. Adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid serta masyarakat.

Adapun Saud menyatakan beberapa karakteristik dasar diantaranya yaitu, pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, serta adanya *teamwork* yang tinggi dan profesional. Pada tataran ini, apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka MBS akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dimana sekolah itu berada.

¹⁸Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 82.

Ciri-ciri MBS bisa dilihat dari sudut sejauh mana sekolah tersebut dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar, mengajar, dan sumber daya seperti digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Ciri-Ciri Sekolah yang Melaksanakan MBS¹⁹

Organisasi Sekolah	Kegiatan Belajar Mengajar	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya dan Administrasi
Menyediakan manajemen/ organisasi/ kepemimpinan transformasional.	Meningkatkan kualitas belajar peserta didik.	Memberdayakan staf dan menempatkan personal yang dapat melayani keperluan peserta didik.	Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan dan mengaplikasikan sumber daya tersebut sesuai dengan kebutuhan.
Menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan untuk sekolahnya sendiri.	Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan peserta didik dan masyarakat.	Memilih staf yang berwawasan MBS.	Mengelola sekolah secara efektif dan efisien.
Mengelola kegiatan operasional sekolah	Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang efektif.	Menyediakan kegiatan untuk pengembangan profesi pada semua staf.	Menyediakan dukungan administratif.
Menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat.	Menyediakan program pengembangan yang diperlukan peserta didik.	Menjamin kesejahteraan staf dan peserta didik.	Mengelola dan memelihara gedung dan sarana sekolah.

¹⁹Ibid., hlm. 78.

Organisasi Sekolah	Kegiatan Belajar Mengajar	Sumber Daya Manusia	Sumber Daya dan Administrasi
Menggerakkan partisipasi masyarakat.	Berperan serta dalam memotivasi siswa.	Menyelenggarakan forum/diskusi untuk membahas kemajuan kinerja sekolah.	

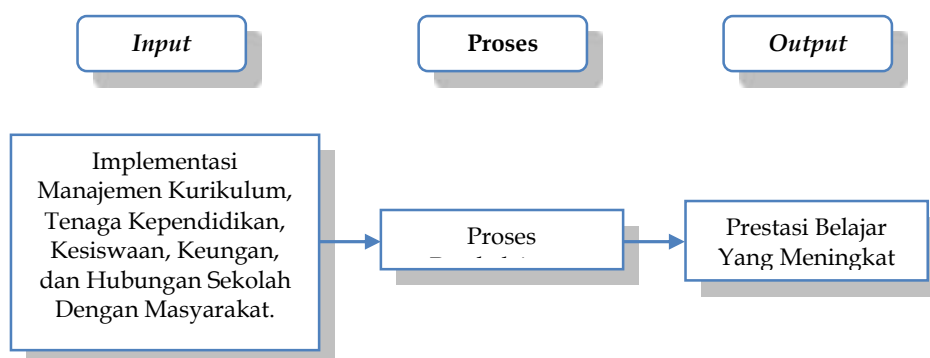
Apabila melihat karakteristik yang dideskripsikan di atas, hal ini berdasarkan pada aspek geografis Indonesia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, maka akan berimplikasi pada kemampuan dan ciri khas bagi sekolah dalam mengimplementasikan MBS. Akan tetapi, ciri khas tersebut diharapkan dapat memberikan implikasi positif terhadap peningkatan personal sekolah, karena tenaga kependidikan dan peserta didik umumnya datang dari berbagai sektor atau latar belakang yang berbeda, seperti latar geografis, kesukuan tingkat sosial, ekonomi, maupun politik. Atas dasar itulah karakteristik yang menerapkan MBS perlu mengoptimalkan aspek-aspek tertentu, yaitu meningkatkan kinerja organisasi sekolah, proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya administrasi.

Selain itu, kerja sama antara warga sekolah yang meliputi guru, pegawai, peserta didik, dan wali murid dengan masyarakat harus dibangun atas dasar kredibilitas yang tinggi. Sekolah harus dapat memacu masyarakat untuk ikut memiliki lembaga guna menumbuhkan iklim kerjasama dengan menganut sistem transparansi, baik dalam program maupun dalam pengelolaan keuangan. Di samping itu, program yang tersusun oleh komponen sekolah harus mampu bersifat berkelanjutan (*sustainability*).

Selanjutnya, implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS), pada hakekatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhir meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui penyelenggaraan manajerial yang mapan. Melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua *stakeholder*-nya maka sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan pada

otonominya akan menjadi suatu instansi pendidikan yang organik, demokratis, kreatif, inovatif serta unik dengan ciri khas sendiri untuk melakukan pembaruan sendiri (*self reform*).

Dalam konteks ini sekolah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Kekuasaan yang dimiliki sekolah antara lain mengambil keputusan dengan rekrutmen serta pengelolaan guru dan pegawai administrasi serta keputusan berkaitan dengan pengelolaan sekolah. Adapun komponen yang didesentralisasikan adalah manajemen kurikulum, manajemen tenaga kependidikan, manajemen kesiswaan, manajemen pendanaan serta manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Secara visualistis, implementasi manajemen berbasis sekolah yang dimaksud dapat dilihat pada skema dibawah ini:



Gambar 2. Bagan Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)²⁰

Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Islam

Masyarakat Muslim memiliki ekspektasi yang sangat besar terhadap keberhasilan dan kemajuan pendidikan Islam. Namun ekspektasi itu belum terealisasi hingga sekarang. Pendidikan Islam telah tertinggal oleh pendidikan Barat sekuler yang telah mempengaruhi hampir semua bentuk pendidikan di dunia ini. Kalaupun terdapat fenomena-fenomena kebangkitan pendidikan Islam, itu baru bersifat kasuistik dan parsial, dan belum menjadi kecenderungan mayoritas, sehingga *image* pendidikan Islam belum

²⁰Umiarso dan Gojali, *Manajemen Mutu Sekolah*, hlm. 87.

dapat mengemuka setidaknya hingga hari ini, apalagi menggeser *image* pendidikan Barat termasuk yang diadaptasi oleh pendidikan sekuler di Indonesia.

Ekspektasi kemajuan pendidikan Islam menyebabkan umat Islam memiliki nilai tawar politik yang cukup tinggi, baik pada skala nasional maupun internasional; secara ekonomi, kemajuan pendidikan Islam akan mengangkat taraf perekonomian umat Islam dan menekan jumlah pengangguran, baik pengangguran orang awam maupun pengangguran intelektual; secara sosial, kemajuan pendidikan Islam akan menginspirasi, memfasilitasi, dan melakukan lompatan-lompatan kreasi sains dan teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia.²¹

Namun dalam tataran realitasnya, pendidikan Islam belum mampu mendiskripsikan ekspektasi yang ideal tersebut karena belum menemukan dan memakai resep atau kunci pembukanya. Paling tidak terdapat tiga kunci kemajuan pendidikan Islam, yaitu:

- a. Epistemologi pendidikan Islam
- b. Manajemen pendidikan Islam, dan
- c. Kesadaran pendidikan

Ketiga kunci kemajuan pendidikan Islam ini bekerja dan bergerak pada ranah tugasnya masing-masing. Ketiganya berjalan berjalan dan berfungsi saling melengkapi. Ketiga kunci ini dapat sangat efektif jika dipraktikkan secara benar dalam kehidupan pendidikan Islam sehari-hari.²²

Secara garis besar, pendidikan Islam dapat dibagi tiga: *pertama*, pendidikan Islam yang berbentuk ide-ide, gagasan-gagasan pemikiran-pemikiran, wawasan-wawasan, konsep-konsep, dan teori-teori; *kedua*, pendidikan Islam yang berbentuk penyelenggaraan, pelaksanaan atau penerapan secara kelembagaan; dan *ketiga*, pendidikan Islam yang berbentuk perilaku umat Islam dalam meresponnya.²³

Jika tiga pembagian ini dikorelasikan dengan tiga kunci yang disebutkan, maka akan dapat dilakukan pemetaan sebagai berikut:

²¹Mujamil Qomar, *Strategi Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 2.

²² Ibid., hlm. 3.

²³ Ibid.

Epistemologi pendidikan Islam sebagai kunci memajukan ide-ide, gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, wawasan-wawasan, konsep-konsep, dan teori-teori pendidikan Islam; manajemen pendidikan Islam sebagai kunci memajukan penyelenggaraan, pelaksanaan atau penerapan pendidikan Islam secara kelembagaan; kesadaran pendidikan sebagai kunci memajukan perilaku umat Islam dalam mengikuti proses pendidikan Islam dan meraih hasilnya.²⁴

Epistemologi tersebut merupakan alat untuk memproses, menyusun, merumuskan, dan membentuk bangunan ilmu pendidikan Islam. Epistemologi ini kemudian bertugas menggali, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan pendidikan Islam.²⁵ Jika epistemologi ini dipahami, dikuasai, dan dipraktikkan secara kontinu dalam mengkonstruksi ilmu pendidikan Islam, maka hampir dapat dipastikan bahwa konsep-konsep, dan teori-teori pendidikan Islam akan mengalami kemajuan pesat. Ibarat “mesin” dalam sebuah perusahaan, perumus atau pembangun ilmu pendidikan Islam adalah mesin yang harus terus bekerja dan digerakkan secara aktif.²⁶

Gerakan kerja epistemologi pendidikan Islam akan semakin maksimal jika dibantu metodologi pendidikan Islam. Epistemologi pendidikan Islam meliputi pembahasan dasar pengetahuan pendidikan Islam, asal-usul, sumber, unsur, batas, jangkauan, validitas, dan metodenya. Ilmu tentang metode pendidikan Islam disebut dengan metodologi pendidikan Islam, sehingga metodologi pendidikan Islam adalah “anak kandung” dari epistemologi pendidikan Islam. Karenanya, pendidikan Islam dalam sebuah bangsa akan maju dan berhasil jika bangsa ini mampu menguasai dan mengimplementasikan epistemologi pendidikan Islam dan metodologi pendidikan Islam. Sebaliknya, bangsa yang buta terhadap

²⁴ Ketiga kunci ini juga perlu dijabarkan ke dalam langkah-langkah konkret semacam “petunjuk pelaksanaan” atau “petunjuk teknis”. Langkah-langkah dari masing-masing kunci tersebut dapat dijadikan acuan dan dikaji yaitu buku karangan Mujamil Qomar “*Epistemologi Pendidikan Islam: dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*”. Untuk kunci yang kedua dapat dibaca dalam buku “*Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*”. Dan untuk kunci ketiga dapat dibaca dalam buku “*Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*”.

²⁵Mujamil Qomar, *Epistemologi Pendidikan Islam; dari Metode Rasional hingga Metode Kritik* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. v.

²⁶Qomar, *Strategi Pendidikan Islam*, hlm. 4.

epistemologi dan metodologi pendidikan Islam tidak mungkin mampu memajukan konsep dan teori pendidikan Islam.

Fungsi kunci kedua yaitu manajemen pendidikan Islam. Untuk menjalankan tugas manajemen pendidikan Islam dengan baik, seorang manajer harus memiliki kemampuan dalam memadukan sumber-sumber pendidikan khususnya sumber-sumber belajar dalam lembaga pendidikan Islam sehingga mampu memfungsikan, memanfaatkan, mengembangkan, dan memaksimalkan kekuatan sumber-sumber tersebut dalam mengawal keberhasilan dan kemajuan pendidikan Islam. Pengelolaan manajemen yang terancang, terprogram, dan tersistem dengan baik akan menjadikan proses dan hasil pendidikan Islam akan maksimal.²⁷

Beberapa kasus yang berkaitan dengan manajemen berikut layak untuk diperhatikan. Ada sekolah atau madrasah yang awalnya mengalami kemunduran, kemudian maju dengan pesat. Sebaliknya, ada sekolah atau madrasah yang awalnya maju, namun kemudian hampir gulung tikar. Ada yang awalnya maju dan tetap bertahan, ada juga yang awalnya termasuk kategori "*la yamûtu wa lâ yahya*" dan tetap seperti itu. Penyebab empat kasus tersebut didominasi oleh faktor manajemen, meskipun terdapat faktor-faktor lainnya.²⁸

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa manajemen tengah dipertaruhkan demi kemajuan lembaga pendidikan Islam. Dengan pengertian lain, tengah ada upaya untuk menggalakkan manajemen pendidikan Islam menjadi kesadaran kolektif dalam memajukan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah. Para manajer pendidikan Islam berusaha mengelola lembaga pendidikan Islam dengan menyelami sifat-sifat dari situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya.²⁹ Cara ini berguna di dalam melakukan pemetaan masalah dan solusinya sekaligus yang ditempuh manajer dalam mengakselerasi dan mengefektifkan kemajuan lembaga pendidikan Islam.

Adapun fungsi kunci ketiga yaitu kesadaran pendidikan dalam memajukan pendidikan Islam. Kesadaran merupakan potensi dan

²⁷Ibid., hlm. 5

²⁸Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam* (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 3.

²⁹Ibid., hlm. 4-5.

motivasi dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau mengikuti proses pendidikan secara serius dan penuh keuletan, sebagai bentuk tanggung jawab moral dirinya sendiri. Keseriusan dan keuletan ini benar-benar muncul secara alamiah tanpa menunggu perintah orang lain, baik orang tua, guru, maupun atasannya.³⁰

Kesadaran pendidikan merupakan kekuatan yang dahsyat dalam merealisasikan keberhasilan pendidikan termasuk keberhasilan pendidikan Islam. Potensi kesadaran ini dapat kita lihat pada murid yang gemar membaca buku atau pada orang-orang yang belajar secara otodidak seperti Hamka, Ajip Rosidi, dan Rosihan Anwar. Sebaliknya, kesadaran pendidikan yang lemah menjadi penghambat yang paling serius menuju kemajuan pendidikan Islam.

Selama ini kurikulum dianggap sebagai penentu keberhasilan pendidikan, termasuk pendidikan Islam. Karena itu, perhatian para guru, kepala madrasah, maupun praktisi pendidikan terkonsentrasi pada kurikulum. Padahal, kurikulum bukanlah penentu utama. Dalam kasus pendidikan di Indonesia, problem paling besar yang dihadapi bangsa ini sesungguhnya bukan problem kurikulum-meskipun bukan berarti kurikulum tidak menimbulkan problem, namun problem yang paling besar adalah 'kesadaran', yakni lemahnya kesadaran untuk meningkatkan SDM, kesadaran untuk menghilangkan kebodohan, maupun kesadaran untuk berbuat yang terbaik.³¹

Tidak dapat dipungkiri kontribusi "kurikulum" terhadap pendidikan Islam seperti halnya komponen lainnya, karena tujuan pendidikan, visi dan misi pendidikan, kurikulum pendidikan, metode pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, dan pendidik (guru, dosen, ustadz), semuanya memiliki peran dan sumbangan terhadap keberhasilan dan kemajuan pendidikan Islam, namun sebatas alat atau perantara, bukan sebagai penentu. Sedangkan yang bertindak sebagai penentu keberhasilan pendidikan (pendidikan Islam) adalah

³⁰Qomar, *Strategi Pendidikan Islam*, hlm. 6.

³¹Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam*, hlm. 149.

'kesadaran' pendidikan, yang terlepas dari sekat-sekat jenis dan bentuk pendidikan apa pun.³²

Jadi, tiga kunci tersebut menjadi pembuka pintu keberhasilan dan kemajuan pendidikan Islam secara komprehensif dan holistik. Ketiga kunci ini saling melengkapi meskipun digunakan dalam menunaikan tugasnya masing-masing. Epistemologi pendidikan bekerja untuk membangun konsep dan teori pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam bekerja untuk membangun keberlangsungan kejayaan institusi pendidikan Islam, sedangkan kesadaran pendidikan bekerja untuk meralisasikan keberhasilan umat Islam dalam mengikuti proses pendidikan Islam dan memperoleh hasilnya.

Ketiga kunci itu dapat diintegrasikan menjadi: Epistemologi manajemen pendidikan Islam, epistemologi kesadaran pendidikan Islam, manajemen kesadaran pendidikan Islam, kesadaran epistemologis pendidikan Islam, dan kesadaran manajerial pendidikan Islam.³³

Konsep integrasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, epistemologi manajemen pendidikan Islam, yaitu integrasi yang merumuskan, membangun, dan mengembangkan ilmu manajemen pendidikan Islam. Konstruksi ilmu ini dimulai dengan merumuskan konsep, hipotesis, dan teori manajemen pendidikan Islam. Integrasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pemikir pendidikan Islam, para ahli filsafat manajemen pendidikan Islam, dan para pakar manajemen pendidikan Islam untuk membangun, menumbuhkan, dan mengembangkan konstruksi ilmu manajemen pendidikan Islam yang masih rapuh dan membutuhkan penguatan secara konseptual, teoritis, dan aplikatif.

Kedua, epistemologi kesadaran pendidikan Islam, yaitu integrasi yang merumuskan, membangun, dan mengembangkan ilmu tentang kesadaran pendidikan Islam. Integrasi ini dapat dimanfaatkan oleh pemikir pendidikan, pakar pendidikan Islam khususnya pakar psikologi pendidikan Islam untuk membangun, menumbuhkan, dan mengembangkan formulasi ilmu tentang kesadaran pendidikan Islam.

³²Mujamil Qomar, *Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*. (Yogyakarta: Arruz Media, 2012), hlm. 148-149.

³³Qomar, *Strategi Pendidikan Islam*, hlm. 7-9.

Kesadaran pendidikan Islam dalam tataran perilaku umat Islam adalah penentu keberhasilan dan kemajuan pendidikan Islam.

Ketiga, manajemen kesadaran pendidikan Islam, yaitu integrasi yang mengelola atau membangkitkan kesadaran pendidikan Islam. Bagaimana perilaku dan penanggung jawab pendidikan Islam dapat disadarkan untuk mengerjakan tugas pendidikan Islam yang melekat pada mereka secara sungguh-sungguh dengan ketulusan yang tinggi. Mereka bisa meliputi siswa/santri/mahasiswa, guru/ustadz/dosen, kepala sekolah/kepala madrasah/pengasuh pesantren/pengasuh majelis ta'lim/pimpinan perguruan tinggi baik rektor, dekan, ketua program studi, maupun direktur, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, Menteri Agama, dan masyarakat beserta tokoh-tokohnya.

Keempat, kesadaran epistemologi pendidikan Islam. Integrasi ini berfungsi membangkitkan kemauan dan keberanian untuk membangun konsep dan teori pendidikan Islam. Kesadaran ini penting sekali dimiliki oleh para praktisi pendidikan Islam yang merasa salah dan belum berani menampilkan teori-teori pendidikan Islam hasil karyanya sendiri.

Kelima, kesadaran manajerial pendidikan Islam. Integrasi ini bertugas menyadarkan para pelaku pendidikan. Siswa mengelola kegiatan belajar, guru mengelola kelas dan proses pembelajaran, kepala madrasah berwenang mengelola lembaga pendidikan Islam yang dipimpin, sedangkan Dirjen Pendidikan Islam dan Menteri Agama berwenang menentukan *policy* umum dalam mengelola lembaga pendidikan Islam yang ada di seluruh Indonesia. Kesadaran manajerial memiliki nilai yang sangat signifikan, sebab manajemen pendidikan Islam merupakan "hal baru" dalam dunia keilmuan sehingga melahirkan banyak perhatian dari berbagai kalangan.

Penutup

Pendidikan Islam merupakan suatu proses yang komprehensif dalam pengembangan kepribadian manusia secara keseluruhan, yang meliputi intelektual, spiritual, emosi dan fisik, sehingga seorang muslim disiapkan dengan baik untuk dapat melaksanakan tujuan kehadirannya oleh Tuhan sebagai hamba dan wakil-Nya di dunia.

Pendidikan Islam dalam konteks manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas kepada sekolah dengan tujuan akhir meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui penyelenggaraan manajerial yang mapan. Melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua *stakeholder*-nya maka sekolah pada semua jenjang dan jenis pendidikan akan menjadi institusi pendidikan yang organik, demokratis, kreatif, inovatif dan unik dengan ciri khas sendiri untuk melakukan pembaruan sendiri.

Melalui otonomi pendidikan ini, ada tiga kunci kemajuan pendidikan Islam, yaitu: Epistemologi pendidikan Islam, manajemen pendidikan Islam, dan kesadaran pendidikan. Tiga kunci tersebut menjadi pembuka pintu keberhasilan dan kemajuan pendidikan Islam secara komprehensif dan holistik. Ketiga kunci kemajuan pendidikan Islam ini bekerja dan bergerak pada ranah tugasnya masing-masing. Ketiga kunci ini dapat sangat efektif jika dipraktikkan secara benar dalam keberlangsungan (*sustainability*) pendidikan Islam sehari-hari. *Wa Allâh a'lam bi al-Shawâb.**

Daftar Pustaka

- Adler, Mortimer J. *Philosophies of Education*. Chicago: University Chicago Press, 1962.
- Arifin, M. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Arifin, M. *Kapita Selekta Pendidikan Islam dan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Bafadal, Ibrahim. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Bawani, Imam. *Segi-segi Pendidikan Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1986.
- Gojali, Imam & Umiarso. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Yogyakarta: Ircisod, 2010.
- Hamdani, Ihsan. *Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2007.

- Hasan, M. Tholhah. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lantabora Press, , 2007.
- Horne, Herman H. *An Idealistic Philoshophies Of Education*. Chichago : University Chicago Press, 1962.
- Ma'arif, Ahmad Syafii. *Pendidikan Berparadigma Profentik*. Yogyakarta: UGM Press, 2004.
- Makdisi, George. *Typology of Institutions of Learning, (An Antology Studies)*, Issa J. Boulatta. Montreal: McGill Indonesia IAIN Development Project, 1992.
- Michael Stanton, Charles. *Pendidikan Tinggi dalam Islam*, terj. Afandi dan Hasan Asari. Jakarta: Logos, 1994.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Qomar, Mujamil. *Epistemologi Pendidikan Islam; dari Metode Rasional hingga Metode Kritik*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam; Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Qomar, Mujamil. *Kesadaran Pendidikan: Sebuah Penentu Keberhasilan Pendidikan*. Yogyakarta: Arruz Media, 2012.
- Qomar, Mujamil. *Strategi Pendidikan Islam*. Jakarta: Erlangga, 2013.
- Tadjab. *Dasar-dasar Kependidikan Islam*. Surabaya: Karya Aditama, 1996.
- Tan, Charlene. *Philosophical Reflections For Education, Chapter 1, Philosoppers on Education*. London: Institut of Education University of London, 1996.